

# EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI *NEW SAKPOLE* DI KABUPATEN SUKOHARJO

Rahmat Agung Tri Utomo

NPP. 32.0464

*Asdaf Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.0464@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0464@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Maisondra, S.H., M.H., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P., M.Han.

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This study is motivated by the effort to increase Motor Vehicle Tax (PKB) revenue in Sukoharjo Regency through the implementation of the *NEW SAKPOLE* application. This application is an initiative of the Central Java Provincial Government to facilitate online PKB payments. **Purpose:** This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the *NEW SAKPOLE* application in increasing Motor Vehicle Tax (PKB) revenue in Sukoharjo Regency. **Method:** The research method used was qualitative descriptive, with data collection through in-depth interviews and analysis of related documents. The effectiveness of PKB revenue is analyzed based on three main dimensions: optimization of objectives, system perspective, and pressure on taxpayer behavior. **Result:** The results of the study revealed that the adoption and use of the *NEW SAKPOLE* Application in Sukoharjo Regency has not been effective. Some of the significant obstacles found include data missynchronization between related agencies and various administrative obstacles. The Sukoharjo Regency Government has taken proactive steps, including increasing socialization activities, strengthening digital infrastructure, and conducting training for service officers. **Conclusion:** The implementation of the *NEW SAKPOLE* application still needs to be improved to achieve optimal tax revenue. There is a need to improve system integration between relevant agencies, strengthen supervision, and better collaboration between various related parties. **Keywords:** *NEW SAKPOLE* Application, Effectiveness, Sukoharjo Regency, Regional Taxes, Motor Vehicle Tax Revenue

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sukoharjo melalui implementasi aplikasi *NEW SAKPOLE*. Aplikasi ini merupakan inisiatif Pemprov Jawa Tengah untuk memfasilitasi pembayaran PKB secara online. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan aplikasi *NEW SAKPOLE* dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sukoharjo. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Efektivitas penerimaan PKB dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama: optimalisasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan terhadap perilaku wajib pajak. **Hasil:** Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adopsi dan penggunaan Aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo belum efektif. Beberapa kendala signifikan yang ditemukan antara lain ketidaksinkronisasi data antar instansi terkait dan berbagai kendala administrasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengambil langkah proaktif, antara lain meningkatkan kegiatan sosialisasi, memperkuat infrastruktur digital, dan melakukan pelatihan

bagi petugas layanan. **Kesimpulan:** Implementasi aplikasi *NEW SAKPOLE* masih perlu ditingkatkan untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Ada kebutuhan untuk meningkatkan integrasi sistem antar instansi terkait, memperkuat pengawasan, dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait.

**Kata Kunci:** Aplikasi *NEW SAKPOLE*, Efektivitas, Kabupaten Sukoharjo, Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan substansi penting dalam suatu negara dalam mengatur kehidupan didalamnya. Pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan publik untuk setiap warga masyarakat melalui hubungan pemerintahan, agar seluruh anggota masyarakat mampu mendapatkan pelayanan sesuai dengan harapan (Taliziduhu Ndraha, 2015). Adanya pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah memiliki dampak positif karena tugas-tugas pemerintahan akan mampu dilaksanakan dengan baik karena pemerintah daerah telah memahami kondisi masyarakatnya dari aspek sosial, ekonomi dan politik (Fauzi, 2019: 1). (Nurhalizah, dkk., 2022: 2), menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan banyak aspek dan segi, karena menyangkut masalah hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menyangkut dengan penyerahan serta pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah. Adanya pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah memiliki dampak positif karena tugas-tugas pemerintahan akan mampu dilaksanakan dengan baik karena pemerintah daerah telah memahami kondisi masyarakatnya dari aspek sosial, ekonomi dan politik (Fauzi, 2019: 1)

Desentralisasi merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk desentralisasi administratif, politik, ekonomi, dan fiskal. (Smith dalam Wahyudi et al., 2020) menjelaskan desentralisasi berkaitan dengan pendelegasian kekuasaan kepada level di bawahnya dalam suatu hirarki teritorial baik di dalam suatu negara maupun kantor-kantor dalam organisasi yang besar. Sistem pengelolaan negara mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan keempat komponen tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk meringankan beban pemerintah pusat dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, yang berkaitan dengan pajak atau pendapatan. (Men et al., 2025) mengatakan bahwa desentralisasi dan hasil yang relevan dengan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi ketidakstabilan politik, dan menetapkan batas-batas kekuasaan yang adil melalui kompetisi politik, akuntabilitas publik, dan insentif. Desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah, terutama dalam bidang keuangan. Salah satu potensi daerah yang dapat ditingkatkan adalah pajak daerah. (Mega Christia & Ispriyarso, 2019)

Dalam konteks tersebut, keuangan daerah memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. (Sinurat, Marja & Panjaitan, 2017) menyatakan bahwa Keuangan daerah merujuk pada seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dan dapat diukur dengan nilai uang. Ini termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah mencakup seluruh proses pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, dana transfer dari pemerintah pusat (seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus), serta pendapatan sah lainnya. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat terwujud dan ketergantungan terhadap dana pusat semakin berkurang.

(Mardiasmo dalam Suoth, 2022: 2), menyatakan bahwa pajak ialah iuran yang dipaksakan yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara, tanpa mendapat manfaat timbal balik yang jelas dan dapat dilihat. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan negara. Pajak daerah merupakan bagian penting dari penerimaan pajak secara keseluruhan. (Nurcholis dalam Rahmawati & Sutrisno, 2020: 2), mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, serta sumber sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber daya keuangan terbesar bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, dan keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap APBD. Semakin besar penerimaan PAD terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

(Widajantie dan Anwar, 2023: 1), menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak mengenai hak kuasa atas kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah. PKB adalah pungutan yang dikenakan kepada pemilik atau pengguna kendaraan bermotor sebagai bentuk kewajiban atas kepemilikan atau penguasaannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengelola PKB sebagai bagian dari pendapatan daerah. Data jumlah kendaraan bermotor dan realisasi PKB di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023. Kabupaten Sukoharjo juga memiliki jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, dimana sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan PKB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi *NEW SAKPOLE* untuk memfasilitasi pembayaran PKB secara daring. Namun, implementasi aplikasi ini di Kabupaten Sukoharjo menghadapi beberapa kendala, termasuk masalah ketidaksinkronan data antar instansi dan hambatan administratif. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi tantangan ini, seperti peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur digital, dan pelatihan petugas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi *NEW SAKPOLE* dalam meningkatkan penerimaan PKB di Kabupaten Sukoharjo.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan aplikasi *NEW SAKPOLE* untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam implementasinya, aplikasi *NEW SAKPOLE* menghadapi beberapa permasalahan, terutama terkait dengan sinkronisasi basis data antar instansi dan hambatan administratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas aplikasi *NEW SAKPOLE* dalam mencapai tujuannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa e-Samsat atau pelayanan pajak kendaraan bermotor online dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Namun, terdapat juga penelitian yang menemukan bahwa implementasi inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya optimal dan efektif.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara harapan akan peningkatan efektivitas penerimaan PKB melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* dengan kenyataan adanya kendala dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi efektivitas penerimaan PKB melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Faris Budiman, Kismartini, dan A. Rina Herawati (2021) membahas efektivitas aplikasi *NEW SAKPOLE* sebagai alternatif kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini fokus pada inovasi layanan berbasis teknologi yang bertujuan mengurangi kerumunan, menghemat waktu, serta mempermudah proses pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *NEW SAKPOLE* cukup efektif diterapkan sebagai alternatif kebijakan di masa krisis, meskipun tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait implementasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Savitri et al., 2022) menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi SAKPOLE dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa kualitas pelayanan aplikasi dan pengetahuan wajib pajak secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PKB, yang pada akhirnya turut meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian oleh (Mesoino et al., 2020) mengevaluasi perbedaan penerimaan PKB sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta uji beda berpasangan (paired t-test), yang hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan PKB setelah implementasi sistem pembayaran online, meskipun masih terdapat beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi.

Penelitian (Mulyono & Riyanto, 2023) fokus pada optimalisasi aplikasi administrasi kendaraan pajak online (SAKPOLE) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pajak kendaraan bermotor di Polda Jawa Tengah. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penggunaan aplikasi, termasuk masalah teknis dan administratif, serta menawarkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Penelitian oleh (Akbari & Mubarak, 2024) membahas implementasi aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dalam meningkatkan pembayaran PKB berbasis digital di UPTD Samsat Padang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk identifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIGNAL cukup berhasil mendukung inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor secara digital, meskipun tetap diperlukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Devaranti, et al., 2023), penelitian ini berfokus pada inovasi layanan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis elektronik melalui aplikasi SIGNAL di UPTD Kantor Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartanti, et al., 2020), penelitian ini berfokus pada pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari penerimaan pajak melalui Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, dan E-Samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada fokus kajian spesifik mengenai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya membahas aspek inovasi kebijakan, kualitas layanan, kepatuhan wajib pajak, atau perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah penerapan sistem online di tingkat provinsi maupun kota besar, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengevaluasi efektivitas aplikasi pada level kabupaten, khususnya di Sukoharjo, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang cenderung memakai pendekatan kuantitatif. Hal ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam mengenai hambatan implementasi, pengalaman pengguna, serta upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui inovasi digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman baru yang memperkaya literatur terkait implementasi sistem digital dalam pengelolaan pajak daerah pada konteks lokal.

#### 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo.

## II. METODE

Keandalan dan validitas hasil dari suatu penelitian akan bergantung pada penelitian yang dirancang dengan baik dengan metodologi yang obyektif, dapat diandalkan dan dapat diulang dengan yang tepat, pengumpulan data dan analisis dengan interpretasi yang logis. Metodologi yang tidak tepat atau salah akan membuat penelitian tidak dapat diterima dan bahkan dapat memberikan informasi yang salah kepada para klinisi (Garg, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo. (Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.si dan Dra Sri Hartati, 2023) Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. (Bhaskar & Manjuladevi, 2016) menyatakan bahwa setiap penelitian yang melibatkan subjek manusia memiliki tingkat risiko yang berbedabeda terhadap individu yang berpartisipasi dan penting untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak partisipan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta hambatan yang terjadi di lapangan terkait penggunaan aplikasi *NEW SAKPOLE*. (Simangunsong, 2017) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, termasuk pihak Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Sukoharjo, petugas pelayanan, dan wajib pajak pengguna aplikasi *NEW SAKPOLE*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait implementasi layanan pajak berbasis digital. Instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara sebagai alat pengumpulan data

utama, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen terkait pelaksanaan aplikasi *NEW SAKPOLE*.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai model Miles dan Huberman. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari (Steers, 1985) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu optimisasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada perilaku. Dimensi optimisasi tujuan menilai sejauh mana aplikasi *NEW SAKPOLE* mampu mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan penerimaan PKB. Perspektif sistem menganalisis hubungan antarkomponen dalam sistem, seperti sinkronisasi data antarinstansi, infrastruktur digital, serta alur administrasi pelayanan. Sementara itu, tekanan pada perilaku mengevaluasi pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi, termasuk tingkat adopsi teknologi, kesadaran, dan kepatuhan dalam membayar pajak. Analisis ini membantu memahami sejauh mana efektivitas aplikasi tercapai, serta faktor-faktor yang memengaruhinya secara menyeluruh.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas penerimaan PKB dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi optimalisasi tujuan berfokus pada pencapaian target penerimaan yang ditetapkan, mengukur kedekatan realisasi dengan target serta mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan. Kedua, perspektif sistem memandang efektivitas sebagai hasil dari keterpaduan berbagai komponen seperti input, proses, output, umpan balik, dan lingkungan eksternal yang bekerja secara harmonis. Ketiga, tekanan pada perilaku menekankan peran perilaku wajib pajak, petugas pajak, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung sistem penerimaan PKB secara keseluruhan. Analisis pada tiap-tiap dimensi efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Steers (1985) sebagai berikut:

#### **3.1. Optimisasi Tujuan**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk UPPD Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari berbagai aspek. Salah satunya dengan melakukan inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Aplikasi *NEW SAKPOLE*. Dalam konsep teori Steers (1985) menjelaskan bahwa optimisasi tujuan ialah berfokus pada pencapaian target penerimaan pajak kendaraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* memiliki sasaran kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang mampu membantu dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, aplikasi *NEW SAKPOLE* telah mampu memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam melakukan pembayaran secara digital atau non tunai. Pelaksanaan aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana pernyataan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Ibu Sri Harnani dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2025 bahwa:

Aplikasi *NEW SAKPOLE* sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sukoharjo karena memudahkan dan mempercepat proses pembayaran pajak. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan secara online, tanpa harus datang ke kantor, sehingga lebih praktis dan efisien. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor lebih mudah dibandingkan

metode konvensional karena memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa harus antre.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya inovasi pembayaran melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* sudah membantu dan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang memiliki kendala dalam pembayaran secara langsung atau konvensional. Adanya penerapan pembayaran melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* tentunya ingin mewujudkan target daripada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 hingga 2024.

**Table 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI PKB	PERSENTASE
1	2014	68,919,200,000	71,211,211,575	103.33%
2	2015	91,101,000,000	80,864,921,325	88.76%
3	2016	91,799,000,000	90,197,749,700	98.26%
4	2017	101,469,100,000	102,939,299,975	101.45%
5	2018	114,588,573,000	121,254,165,775	105.82%
6	2019	130,646,000,000	137,356,970,075	105.14%
7	2020	140,700,000,000	137,064,612,500	97.42%
8	2021	157,785,000,000	150,725,536,000	95.53%
9	2022	188,810,070,000	176,950,849,000	93.72%
10	2023	207,530,445,000	181,441,555,625	87.48%
11	2024	222,650,243,000	188,308,765,175	84.58%

Sumber: UPPD Kabupaten Sukoharjo 2025

Penerimaan PKB pada periode 2014-2016 menunjukkan fluktuasi dengan pencapaian target yang bervariasi, mulai dari melebihi target (2014) hingga berada di bawah target (2015), sebelum kembali mendekati target pada tahun 2016. Setelah implementasi aplikasi *NEW SAKPOLE* pada tahun 2017, terjadi peningkatan signifikan dalam pencapaian target PKB hingga tahun 2019, bahkan melebihi 105%. Meskipun terjadi penurunan persentase pencapaian target pada periode 2020-2024, tren secara keseluruhan setelah implementasi *NEW SAKPOLE* menunjukkan peningkatan penerimaan PKB dibandingkan periode sebelumnya, mengindikasikan kontribusi positif aplikasi tersebut terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan, meskipun tantangan masih perlu diatasi.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo dapat dibayarkan melalui samsat induk, samsat keliling, dan berbagai pembayaran online salah satunya dengan menggunakan aplikasi *NEW SAKPOLE*. Kontribusi aplikasi *NEW SAKPOLE* terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana pernyataan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Ibu Sri Harnani dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2025 bahwa:

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah daerah belum tercapai selama tiga tahun terakhir, sehingga secara otomatis penerapan aplikasi *New SAKPOLE* juga belum mencapai target yang diharapkan. Di Sukoharjo sendiri, jumlah pengguna aplikasi ini baru mencapai kurang lebih 1% dari keseluruhan akumulasi wajib pajak, yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat

dalam memanfaatkan layanan digital ini. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan atau upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penggunaan New Sakpole

Berdasarkan wawancara dan data tahun 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi aplikasi *NEW SAKPOLE* terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo masih tergolong rendah, tercatat belum mencapai 2% dari total penerimaan pada tahun 2023 dan 2024. Data kontribusi *NEW SAKPOLE* terhadap penerimaan PKB sebagai berikut:

**Table 2 Kontribusi NEW SAKPOLE dalam Penerimaan PKB di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023**

URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	207,530,445,000	181,441,555,625	87.43%
SAMSAT		179,576,884,500	
NEW SAKPOLE		1,864,671,125	1,03%

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah

**Table 3 Kontribusi NEW SAKPOLE dalam Penerimaan PKB di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024**

URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	222,650,243,000	188,308,765,175	84.58%
SAMSAT		185,635,231,800	
NEW SAKPOLE		2,673,533,375	1,42%

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kedua tabel diatas, penerimaan PKB di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan target dan realisasi dari tahun 2023 ke 2024, meskipun persentase realisasi terhadap target menurun. SAMSAT tetap menjadi kontributor utama penerimaan PKB, namun *NEW SAKPOLE* menunjukkan peningkatan kontribusi yang positif dalam hal jumlah dan persentase, meskipun kontribusinya masih jauh lebih kecil dibandingkan SAMSAT.

Berdasarkan wawancara dan data yang disajikan, penulis menyimpulkan penerapan aplikasi *NEW SAKPOLE* dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo telah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan menunjukkan peningkatan kinerja, namun belum mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Penggunaan aplikasi ini masih terbatas, sehingga dampaknya terhadap optimalisasi pajak belum maksimal. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat lebih memahami manfaat aplikasi ini, didukung dengan peningkatan infrastruktur dan sistem untuk mengatasi kendala teknis yang masih sering terjadi sehingga adopsi penggunaan aplikasi dapat meningkat.

### 3.2. Perspektif Sistem

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* yang efektif, perspektif sistem memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana berbagai komponen saling berinteraksi dan memengaruhi hasil akhir. Urgensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Dalam konteks ini, aplikasi *NEW SAKPOLE* hadir sebagai solusi strategis untuk mempercepat proses pembayaran dan mengurangi biaya operasional. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ibu Sri Harnani pada tanggal 15 Januari 2025 berpendapat bahwa:

Aplikasi ini mampu mempercepat dan mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat. Hal ini meningkatkan efisiensi administratif pengelolaan PKB. Namun proses verifikasi dan validasi data masih memerlukan waktu yang lebih lama. Keterlambatan dalam proses ini terkadang menghambat kelancaran penyelesaian administrasi pajak.

Aplikasi *NEW SAKPOLE* berjalan efektif secara sistem bukan hanya dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembayaran melainkan harus melihat aspek lainnya. Sistem aplikasi juga memuat seluruh database dalam proses pelayanan kepada masyarakat mulai integrasi data dan mencakup seluruh objek pajak. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ibu Sri Harnani pada tanggal 15 Januari 2025 berpendapat bahwa:

Proses integrasi data kendaraan bermotor ke dalam aplikasi *NEW Sakpole* dilakukan oleh Bapenda pusat melalui Lahtabang. Sementara itu, untuk UPPD, proses integrasi data dilakukan oleh admin UPPD yang bertugas memastikan data yang diterima dari pusat dapat dikelola dan digunakan dengan baik dalam sistem aplikasi. Data kendaraan bermotor yang tersedia di aplikasi *New Sakpole* pada dasarnya sudah mencakup seluruh objek pajak yang terdaftar di Kabupaten Sukoharjo, dan sistemnya sudah berjalan dengan baik. Namun, terkadang masih terdapat kendala dalam mutasi kendaraan, baik keluar maupun masuk, yang belum terinput secara real-time.

Integrasi data pada aplikasi *NEW SAKPOLE* telah berjalan cukup baik namun perlu perbaikan pada aspek-aspek tertentu. Perbaikan sistem aplikasi tersebut dilakukan untuk pembaharuan sistem dan ketika terdapat laporan dari pengguna aplikasi tersebut. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ibu Sri Harnani pada tanggal 15 Januari 2025 berpendapat bahwa:

Pengguna dapat menyampaikan umpan balik terkait aplikasi *NEW SAKPOLE* melalui Laporan Gubernur serta kanal aduan di media sosial. Kedua kanal ini memungkinkan wajib pajak untuk memberikan masukan, melaporkan kendala, atau mengajukan pertanyaan terkait layanan, sehingga pemerintah dapat segera menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas pelayanan. Proses tindak lanjut terhadap umpan balik yang diberikan oleh pengguna dilakukan dengan cepat, biasanya tidak lebih dari 24 jam, untuk memastikan layanan tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa aplikasi *NEW SAKPOLE* telah mampu membantu wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo dengan mempercepat proses pembayaran dan pengelolaan data wajib pajak, meskipun masih terdapat kendala pada verifikasi data dan mutasi kendaraan yang memerlukan perbaikan. Untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi, diperlukan peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, percepatan proses verifikasi, serta pemanfaatan umpan balik pengguna secara responsif dan berkelanjutan, sehingga aplikasi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

### **3.3. Tekanan Pada Perilaku**

Upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai dimensi tekanan yang memengaruhi perilaku.

Dimensi tekanan ini mencakup urgensi pencapaian target penerimaan, tuntutan efisiensi pelayanan, dan harapan akan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Urgensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menciptakan tekanan yang signifikan, memengaruhi perilaku baik wajib pajak maupun petugas pajak. Bagi wajib pajak, tekanan ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pembayaran, terutama melalui aplikasi *NEW SAKPOLE*. Mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk memanfaatkan kemudahan aplikasi demi menghindari sanksi atau denda. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana pernyataan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Ibu Sri Harnani dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2025 bahwa:

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo sejak diterapkannya aplikasi *NEW SAKPOLE* sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan aplikasi ini masih perlu didorong lebih luas agar dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sukoharjo.

Aplikasi *NEW SAKPOLE* dinilai memberikan kemudahan bagi wajib pajak, namun penggunaannya perlu didorong lebih luas agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Angka kepatuhan dan realisasi penerimaan PKB yang masing-masing mencapai 79% dan 80% menunjukkan hasil yang positif, tetapi sosialisasi dan inovasi yang lebih intensif diperlukan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

**Table 4 Tingkat Kepatuhan atau Kesadaran Bayar PKB Tahun 2022-2024 Kabupaten Sukoharjo**

TAHUN	OBYEK	PKB
2024	79%	80%
2023	45,8%	51%
2022	18,8%	24,7%

Berdasarkan Tabel 4, tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2024. Persentase OBYEK (pendataan kendaraan) naik dari 18,8% menjadi 79%, dan persentase PKB (pembayaran pajak) meningkat dari 24,7% menjadi 80%. Tren positif ini mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB, meskipun pendataan kendaraan masih perlu ditingkatkan.

Urgensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi petugas pajak atau pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Tekanan untuk mencapai target penerimaan mendorong petugas pajak untuk lebih proaktif dalam membantu wajib pajak, terutama dalam penggunaan aplikasi *NEW SAKPOLE*. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Ibu Sri Harnani pada tanggal 15 Januari 2025 berpendapat bahwa:

Kompetensi pengelola pajak kendaraan bermotor dalam mengelola aplikasi NEW SAKPOLE di Kabupaten Sukoharjo sudah baik, meskipun UPPD sebenarnya hanya menerima data dari Bapenda pusat, yang sifatnya selalu dinamis dan berubah-ubah. Meskipun demikian, data tersebut selalu dikelola dengan baik, sehingga proses pelayanan kepada wajib pajak tetap berjalan lancar dan optimal.

Tekanan perilaku pada pelaksanaan aplikasi tersebut tidak hanya bagi wajib pajak dan pegawai namun perlu adanya pengawasan serta transparansi dalam pelaksanaannya. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Bapak Purwanto pada tanggal 15 Januari 2025 berpendapat bahwa:

Ya, terdapat mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan aplikasi *NEW SAKPOLE* berjalan sesuai prosedur. Pemantauan internal dilakukan secara rutin setiap bulan guna melihat perkembangan dan kinerja aplikasi. Selain itu, terdapat pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapenda untuk memastikan sistem tetap optimal.

Berdasarkan wawancara dan studi data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aplikasi NEW SAKPOLE di Kabupaten Sukoharjo diawasi secara ketat melalui mekanisme pemantauan internal bulanan, pembinaan, dan evaluasi oleh Bapenda, serta pemantauan oleh Bapenda Pusat untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai prosedur dan mendukung optimalisasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PKB.

Dimensi tekanan pada perilaku dalam efektivitas penerimaan PKB melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo menyoroti pentingnya perilaku wajib pajak yang semakin patuh dalam membayar pajak, petugas pajak yang kompeten dan proaktif dalam memberikan pelayanan, serta pengawasan yang ketat dan transparan dalam pelaksanaan sistem. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, kompetensi petugas dalam mengelola sistem, dan adanya pengawasan yang efektif dinilai sebagai faktor krusial dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB di wilayah tersebut.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo masih belum efektif. Hambatan utama yang teridentifikasi mencakup masalah sinkronisasi data antarinstansi, hambatan administratif, rendahnya tingkat adopsi aplikasi oleh wajib pajak, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan inovasi pelayanan digital dengan realisasi implementasi di lapangan. Jika dibandingkan dengan penelitian (Budiman et al., 2021) yang menyimpulkan bahwa aplikasi *NEW SAKPOLE* efektif sebagai alternatif kebijakan pembayaran PKB di Provinsi Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas di tingkat kabupaten belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh konteks geografis yang berbeda serta fokus penelitian: penelitian sebelumnya lebih menyoroti inovasi kebijakan, sementara penelitian ini fokus pada penerimaan pajak di tingkat daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Savitri et al., 2022), yang menunjukkan bahwa kualitas layanan aplikasi dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PKB di Kota Semarang. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa di Sukoharjo, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat menjadi hambatan besar dalam mendorong tingkat adopsi dan kepatuhan, sehingga penerimaan pajak masih kurang optimal.

Sementara itu, hasil penelitian ini juga mendukung sebagian temuan (Mesoino et al., 2020), yang menemukan adanya peningkatan penerimaan PKB setelah penerapan e-Samsat di Sulawesi Utara. Namun, perbedaannya terletak pada konteks lokal: di Sukoharjo, meskipun aplikasi digital sudah diterapkan, masalah teknis dan administratif masih menghambat optimalisasi penerimaan.

Penelitian ini juga sejalan dengan kritik dalam penelitian (Mulyono & Riyanto, 2023), yang menunjukkan bahwa meskipun aplikasi administrasi pajak online (SAKPOLE) membawa kemudahan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan teknis dan kelemahan dalam pelayanan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika implementasi aplikasi NEW SAKPOLE di tingkat kabupaten, yang sebelumnya belum banyak diungkapkan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas layanan berbasis digital guna mendorong optimalisasi penerimaan PKB.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PKB melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur pembayaran, serta keamanan data. Beberapa kendala seperti ketidakstabilan jaringan internet dan kurangnya sosialisasi tentang aplikasi masih menjadi tantangan. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, perkembangan teknologi digital, serta dukungan dari berbagai pihak terkait seperti kepolisian dan lembaga keuangan.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas aplikasi *NEW SAKPOLE*, berbagai upaya telah dilakukan, baik dalam bentuk upaya langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi petugas pajak, penyederhanaan kebijakan dan prosedur pembayaran, serta peningkatan keamanan data wajib pajak. Sedangkan, upaya tidak langsung mencakup peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Meskipun aplikasi ini telah menjadi inovasi penting dalam mempermudah pembayaran pajak secara daring, realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Hambatan utama berasal dari faktor internal, seperti masalah infrastruktur teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya integrasi dan sinkronisasi data antarinstansi, serta kebijakan yang belum mendukung penuh. Faktor eksternal, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dukungan antarinstansi, dan perkembangan teknologi, juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, pelatihan petugas, dan penguatan infrastruktur digital, tetapi langkah-langkah ini masih perlu diperluas dan diperkuat dengan strategi yang lebih terencana dan kolaboratif. Analisis berbasis teori efektivitas (Steers, 1985) menunjukkan bahwa pencapaian tujuan, efektivitas sistem, serta perilaku wajib pajak sebagai pengguna layanan masih menghadapi tantangan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi berkelanjutan, inovasi layanan yang adaptif, serta kolaborasi

antaraktor yang lebih solid agar aplikasi *NEW SAKPOLE* benar-benar mampu meningkatkan penerimaan PKB dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah penelitian hanya terbatas di Kabupaten Sukoharjo sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah atau Indonesia. Kedua, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sehingga hasilnya bersifat interpretatif dan tidak menyajikan analisis statistik kuantitatif. Ketiga, jumlah dan variasi informan terbatas, sehingga ada kemungkinan informasi yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan. Keempat, jangka waktu penelitian yang relatif singkat membuat penelitian ini mungkin tidak menangkap dinamika atau perubahan jangka panjang yang terjadi dalam implementasi aplikasi *NEW SAKPOLE*.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah agar mencakup lebih banyak daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas aplikasi pembayaran pajak berbasis digital. Selain itu, pendekatan mixed-method (gabungan kualitatif dan kuantitatif) juga dapat digunakan untuk menghasilkan analisis yang lebih kaya, termasuk pemodelan statistik terkait kepatuhan wajib pajak atau faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak. Penelitian mendatang juga diharapkan mampu mengeksplorasi faktor teknologi yang lebih mendalam, seperti usability aplikasi, kepuasan pengguna, dan tingkat keamanan data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari implementasi sistem digital terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Y. R., & Mubarak, A. (2024). Implementasi Program Aplikasi SIGNAL dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Digital Di UPTD Samsat Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 15961–15968. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/14656%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/14656/11231>
- BAJ, T. D. W., & BAJ, S. A. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Bermotor, K., Era, D. I., Budiman, F., & Herawati, A. R. (2021). Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>. 22(01), 20–25.
- Bhaskar, S. B., & Manjuladevi, M. (2016). Methodology for research II. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 646–651. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190620>
- Devaranti, S., Murodi, H. A., & Machrunnisa, M. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) Di Uptd Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 127–146. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.2637>
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.si dan Dra Sri Hartati, M. S. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Fauzi A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Garg, R. (2016). Methodology for research I. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 640–645. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190619>
- Hartanti, Karina, A., & Ratiyah. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125–136.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>
- Men, S., Aimimtham, S., Chamruspanth, V., Nurmandi, A., Sohsan, I., Lawelai, H., & Younus, M. (2025). From Centralization To Decentralization: Organizational Restructuring Within a Legislative Context in the Public Sector. *Corporate Law and Governance Review*, 7(1), 85–99. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i1p8>
- Mesoino, G. C., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2), 130–141.
- Mulyono, D., & Riyanto, M. (2023). Optimalisasi Aplikasi Administrasi Kendaraan Pajak Online (Sakpole) Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan. *Cita Hukum Indonesia*, 174–187. <https://journal.empatpilarcendikia.id/index.php/chi/article/view/24%0Ahttps://journal.empatpilarcendikia.id/index.php/chi/article/download/24/16>
- Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. (2022). Keseimbangan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam efektifitas sistem pemerintahan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 409–417.
- Rahmawati, & Sutrisno, E. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.32834/jpap.v2i2.229>
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Nafisatulizzam, N. (2022). Pengaruh

Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(8), 811–824.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Cet. 1). Alfabeta.

Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah* (A. Haidar (ed.); Pertama).

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi* (Cetakan Ke). Erlangga.

Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.

Taliziduhu Ndraha. (2015). *Kybernology : ilmu pemerintahan baru 1*.

Wahyudi, A., Permadi, R. N., & Zakiyah, S. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Impikasinya. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue January).

